



RENCANA KERJA TAHUN 2018



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

JL. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta – 55213
Telepon : (0274) 562150, (0274) 512080 (Psw. 2900 – 2931), Fax (0274) 562150 PSW 2903
website [http:// www.bkd.jogjaprov.go.id](http://www.bkd.jogjaprov.go.id), e-mail : bkd@jogjaprov.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 058/05010/2017**

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018
- MENINGAT** : a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012 – 2017;
- h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2018;

- i. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 058/565/PTDI/2015 tanggal 21 Januari 2016 tentang Rencana Strategis Perubahan Kedua Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

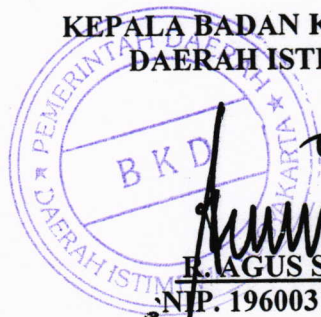
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;
- KEDUA** : Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Renja Badan Kepegawaian Daerah adalah dokumen perencanaan Badan Kepegawaian Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- KETIGA** : Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 21 Juli 2017

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



R. AGUS SUPRIYANTO
NIP. 19600318 198603 1 012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2018 yang memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun.

Kami berharap Rencana Kerja ini dapat berguna dan dimanfaatkan oleh segenap pengguna dan pihak-pihak yang berkepentingan di unit kerja Badan Kepegawaian Daerah DIY. Rencana ini dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan pencapaian visi dan misi tahun 2018 di bidang kepegawaian.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah DIY ini masih banyak kekurangan, sehingga kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk menyempurnakan penyusunan Rencana Program kerja di masa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini.

Yogyakarta,

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta



R. AGUS SUPRIYANTO

NIP. 19600318 198603 1 012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penyusunan Renja SKPD	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Landasan Hukum	5
D. Maksud dan Tujuan.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU (2016)	
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu (2016) dan Capaian Renstra SKPD	11
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	11
C. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPDP	17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	19
B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	20
C. Program dan Kegiatan	20
BAB IV PENUTUP	
A. Penutup	39
B. Pelaksanaan Forum SKPD.....	39

DAFTAR TABEL

1. Format T - VI. C. 1.....	iii
2. Format T - VI. C. 5.....	iv
3. Format T - VI. C. 10.....	v

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama periode 1 (satu) tahun. Dokumen perencanaan ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah DIY sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Pemerintah Daerah DIY dan terjabar ke dalam Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tugas dan fungsi BKD DIY sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah.

. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Fungsi BKD DIY, maka berikut ini adalah fungsi BKD DIY:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian
2. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian
4. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota
5. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Jumlah pegawai di Badan Kepegawaian Daerah DIY per 31 Desember 2016 terdiri atas 102 PNS dan 3 orang PNS titipan. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin ialah sebagai berikut :

Tabel I.1
Jumlah Pegawai BKD DIY Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah		Jumlah Total
		Laki- laki	Perempua n	
1.	Kepala Badan Eselon II.a	1	0	1
2.	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Balai Eselon III.a	5	1	6
3.	Kepala Subbag/Subbid/Seksi Eselon IV.a	5	9	14
4.	Fungsional Umum	42	39	81
5.	Fungsional Tertentu	0	3	3

Sumber data : Sistem Informasi Kepegawaian Pemda DIY per 31 Desember 2016

Lokasi kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY berada di luar kompleks Kepatihan yaitu di Jalan Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta. Kondisi ini mempengaruhi kebutuhan barang, jasa, sarana dan prasarana yang dibutuhkan lebih dari instansi lainnya. Barang dan jasa yang dibutuhkan meliputi penggunaan untuk operasional kegiatan dan pemeliharaan sarana prasarana yang dikelola. Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang ada cukup memadai untuk mendukung aktivitas pelayanan di bidang kepegawaian. Seiring perjalanan waktu, kondisi gedung perkantoran mulai mengalami kerusakan. Demi kenyamanan tempat kerja, direncanakan untuk membangun gedung perkantoran baru. Tahapan telah diawali pada tahun 2013 dengan penyusunan *masterplan* dan tahun 2014-2016 tahap penyusunan DED pembangunan gedung dengan mengikuti perkembangan kelembagaan di Pemerintah Daerah DIY. Pada tahun-tahun selanjutnya direncanakan untuk pembangunan gedung kantor tersebut dan saat pembangunan telah terselesaikan gedung dapat segera difungsikan.

Permasalahan umum bidang kepegawaian yang menjadi tanggung jawab BKD antara lain:

1. Alokasi dan distribusi PNS belum merata.
2. Jumlah dan kualitas PNS belum memadai sesuai kebutuhan jabatan.

3. Penempatan PNS dalam jabatan masih kurang sesuai dengan standar kompetensi jabatan, kualifikasi pendidikan dan perlu adanya pola pembinaan karier PNS.
4. Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat yang masih belum mengakomodir kebutuhan diklat aparatur di Pemda DIY.
5. Pemetaan kebutuhan, pengelolaan serta pengembangan aparatur Pemerintah Daerah DIY yang belum tersusun secara sistematis.
6. Masih rendahnya tingkat penghasilan dan kesejahteraan PNS.
7. Kinerja PNS masih perlu ditingkatkan, khususnya tingkat kedisiplinan pegawai.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, Badan Kepegawaian Daerah DIY menyusun Renja sebagai penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama periode 1 (satu) tahun. Dokumen perencanaan ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah DIY sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD DIY dan terjabar ke dalam Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DIY.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pegelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 tahun 2008;

13. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah;
16. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 058/0565/PTDI/2015 tanggal 21 Januari 2016 tentang Rencana Strategis Perubahan Kedua Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2017.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Renja SKPD disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang akan dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen ini juga akan menjadi acuan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2018. Maksud penyusunan Renja SKPD yaitu:

- a. Sebagai dasar acuan khususnya bagi aparatur Badan Kepegawaian Daerah DIY dan berbagai stakeholder yang terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 1 (satu) tahun;
- b. Sebagai petunjuk arah serta pedoman dalam menyusun Rencana Operasional Pelaksanaan Program Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah DIY selama 1 (satu) tahun anggaran.

2. TUJUAN

Renja SKPD Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD dengan menggunakan pagu dana indikatif beserta sumbernya yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.
- b. Memberikan arah dan acuan bagi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati. Seluruh upaya dilakukan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dengan koordinasi dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
- c. Untuk menjadi bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dalam pelaksanaan program kegiatan lebih efektif dan efisien;
- d. Untuk memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja di Badan Kepegawaian Daerah DIY dan dengan stakeholder lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- e. Sebagai media pengukur kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
- f. Sebagai bahan dalam evaluasi untuk penetapan strategi pelaksanaan program kegiatan di waktu atau tahun yang akan datang.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah DIY adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- C. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD DIY
- D. Review terhadap rancangan awal RKPD
- E. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Tujuan terhadap kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja
- C. Program dan Kegiatan

BAB IV

PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU (2016) dan CAPAIAN RENSTRA SKPD

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan terdiri atas:

1. Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur

Penerimaan PNS dari jalur seleksi umum tidak dapat dilaksanakan dikarenakan masih diberlakukannya moratorium pegawai selama tahun 2016 dengan mengacu kepada Surat Menpan-RB RI Nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015. Capaian di kegiatan ini adalah sebesar 99%, dari target 100%. Meski demikian, ada penambahan target capaian dari kegiatan ini yaitu kegiatan penerimaan pegawai non PNS yang diambil untuk mengakomodir kekurangan pegawai yang ada di masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja sesuai rencana meliputi kegiatan:

1. Penyediaan jasa surat menyurat telah terpenuhi sesuai kebutuhan dan dana yang dianggarkan.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik telah tercukupi dengan dana yang dianggarkan.
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor telah tercukupi dengan dana yang dianggarkan.
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional telah tercukupi dengan dana yang dianggarkan.

5. Penyediaan jasa administrasi keuangan telah tercukupi dengan dana yang dianggarkan.
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor telah tercukupi dengan dana yang dianggarkan.
7. Penyediaan alat tulis kantor telah tercukupi dengan dana yang dianggarkan.
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan telah tercapai dan terpenuhi dengan dana yang dianggarkan.
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor telah tercukupi dengan dana yang dianggarkan.
10. Penyediaan peralatan rumah tangga telah tercukupi dengan dana yang dianggarkan.
11. Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan telah tercapai targetnya dan tercukupi anggarannya.
12. Penyediaan makanan dan minuman telah tercapai sesuai target dan dana yang dianggarkan juga terserap sesuai kebutuhan.
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah bisa terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan dan juga anggaran yang disediakan.
14. Penyediaan jasa keamanan kantor/gedung/tempat kerja, dana yang dianggarkan mampu menyediakan tenaga keamanan sesuai target.
15. Pengelolaan arsip dinamis SKPD dapat tertata dengan baik dengan memanfaatkan anggaran yang sudah disediakan.
16. Pengadaan perlengkapan gedung kantor bisa tersedia sesuai dengan kebutuhan dan dana yang ada.
17. Pengadaan peralatan gedung kantor tercapai sesuai target dan keuangan yang sudah dianggarkan.
18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor telah tercukupi dengan dana yang telah dianggarkan.
19. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional telah tercukupi dengan dana yang dianggarkan.
20. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor telah tercukupi dengan dana yang dianggarkan.

21. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor telah tercukupi dengan dana yang dianggarkan.
22. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur telah tercukupi dengan dana yang dianggarkan.
23. Fumigasi arsip dan termit kontrol sudah dilakukan terhadap 2 ruang arsip.
24. Penyusunan laporan kinerja SKPD telah terlaksanan dengan baik dan telah tercukupi dengan dana yang dianggarkan.
25. Penyusunan laporan keuangan SKPD dapat dikerjakan sesuai dengan rencana dan telah tercukupi dengan dana yang dianggarkan.
26. Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi serta pengelolaan website dapat terlaksana dengan baik dan telah terpenuhi dengan anggaran yang ada.
27. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD dapat dilaksanakan dengan baik dan juga bisa berjalan sesuai dengan dana yang telah dianggarkan.
28. Pengembangan aparatur dapat terlaksana dengan baik dan telah tercukupi dengan anggaran yang ada.
29. Pengukuran kompetensi pegawai dapat terlaksana dengan baik.
30. Pengembangan kemitraan pengukuran kompetensi dapat terlaksana dengan baik dalam rangka pengembangan jejaring kerja.
31. Pengelolaan kepangkatan dapat terlaksana dengan baik meski dengan keterbatasan dana yang ada.
32. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi aparatur sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
33. Penghargaan dan kesejahteraan Aparatur sudah terlaksana sesuai dengan rencana.
34. Pengelolaan Jabatan telah dilaksanakan meskipun ada kebijakan yang mengharuskan beberapa hal tidak dapat dilaksanakan.
35. Pemulangan pegawai yang pensiun telah dilaksanakan.
36. Perpindahan aparatur telah dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan dana yang ada.

37. Pembangunan database informasi kearsipan aparatur dilakukan dalam rangka pengelolaan arsip kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dan sudah terlaksana dengan baik.
38. Pengembangan ISO dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah DIY maupun dari luar DIY.
39. Pengembangan profesionalisme aparatur telah dapat melaksanakan kegiatan dengan baik.
40. Pengembangan SDM assessor telah dilaksanakan dengan dukungan dana yang ada.

Tabel.2.1
Rekap Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis 2012 s/d 2017

Kode	Urusan/bidang urusan/program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program Renstra SKPD s/d thn 2017	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2016			Target program/kegiatan (Renja SKPD thn 2016)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d 2016	
					Target Renja thn 2017	Realisasi Renja thn 2016	Tk. Realisasi (%)		Realisasi capaian program/kegiatan s/d thn 2016	Tk. Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.0.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian									

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2	08.00		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
1.	2	08.00	05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR									
1.	2	08.00	33.05	Surat ijin LN		125 surat	116 surat		116 surat	100%	125 surat	116 surat	
			5.	Laporan AKD		1 lap	1 lap		1 lap	100%	1 lap	1 lap	
				STLUD		100 TLUD	138 STLUD		138 STLUD	100%	100 TLUD	138 STLUD	
				STLUPI		30STLUPI	84 STLUPI		84 STLUPI	100%	30 STLUPI	84 STLUPI	
				Surat ijin/keterangan belajar		50 surat	66 surat		66 surat	100%	50 surat	66 surat	
1.	2	08.00	33.05	Profil potensi		860 orang	726 orang		726 orang	100%	400 orang	726 orang	
			6.	Profil kompetensi		760 orang	128 orang		128 orang	100%	128 orang	128 orang	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Konseling psikologi kelompok		150 orang	100 orang		100 orang	100%	150 orang	100 orang	Ketidaktercapaian dikarenakan efisiensi anggaran
				Konseling psikologi individu PNS dan keluarga		20 sesi	20 sesi		20 sesi	100%	20 sesi	20 sesi	
				Alat ukur assessment center		1 alat	1 alat		1 alat	100%	1 alat	1 alat	
1.	2	08.0	33.05	Tersusunnya evaluasi kerjasama pengukuran kompetensi			1 dok		1 dok	100%	1 dok	1 dok	
				Tercapainya kesepakatan layanan dengan calon mitra kerjasama		1 kesepakatan	1 lokasi		1 lokasi	100%	1 lokasi	1 lokasi	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2	08.0	33.05	Laporan proyeksi kebutuhan pegawai		1 lap	1 lap		1 lap	100%	1 lap	1 lap	
		0.	8.	Pengangkatan CPNS mjd PNS dr pelamar umum dan honorer kategori II			162 orang		162 orang	100%	162 orang	162 orang	
				Seleksi pegawai Pegawai (PNS dan Non PNS)		400 orang	814 orang		814 orang	100%	428 orang	814 orang	Adanya kebijakan moratorium pegawai Surat Menpan-RB RI Nomor B/2163/M.P AN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Terlaksananya bimtek pembentukan karakter CPNS formasi 2014			140 orang		140 orang	100%	140 orang	140 orang	
				Keputusan Gubernur tentang pengangkatan kembali PTT		1 SK	1 SK		1 SK	100%	1 SK	1 SK	
1.	2	08.0	33.05	Rapat koordinasi terpadu kenaikan pangkat		2 periode	2 periode		2 periode	100%	2 periode	2 periode	
				Penyerahan SK kenaikan pangkat		1000 SK	1.090 SK		1.090 SK	100%	1.200 SK	1.090 SK	
1.	2	08.0	33.06	Pemeliharaan mesin presensi elektronik		120 mesin	120 mesin		120 mesin	100%	120 mesin	120 mesin	
				Peningkatan pemahaman peraturan perundangan		100 orang	100 orang		100 orang	100%	100 orang	100 orang	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Peningkatan disiplin aparaturnya melalui pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara		150 orang	150 orang		150 orang	100%	150 orang	150 orang	
				Peningkatan disiplin aparaturnya melalui rapergub		1 rapergub	1 rapergub		1 rapergub	100%	1 rapergub	1 rapergub	
				Penegakan disiplin aparaturnya melalui penanganan kasus pelanggaran disiplin		13 kasus	1 SK		1 SK	100%	1 SK	1 SK	
				Penegakan disiplin aparaturnya melalui penyelesaian surat ijin/surat keterangan		75 surat	195 surat		195 surat	100%	75 surat	195 surat	
				Pengadaan mesin presensi		35 mesin	26 mesin		26 mesin	100%	26 mesin	26 mesin	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2	08.0	33.06	Peningkatan layanan kepegawaian melalui aplikasi		2 aplikasi	2 aplikasi		2 aplikasi	100%	2 aplikasi	2 aplikasi	
	0.	0.	2.	Pemeliharaan database presensi elektronik		1 database	1 database		1 database	100%	1 database	1 database	
				Akurasi data pegawai pelimpahan SMA/SMK Kab/kota melalui pengelolaan formulir isian pegawai			6.506 formulir		6.506 formulir	100%	10.000 formulir	6.506 formulir	
				Laporan statistik pegawai		17 lap	17 lap		17 lap	100%	17 lap	17 lap	
				Penyediaan back up data			7.250 orang		7.250 orang	100%	7.250 orang	7.250 orang	
				Pengembangan sistem aplikasi			5 sistem		5 sistem	100%	5 sistem	5 sistem	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sistem informasi presesnsi dan sistem monev PNSD		1 sistem	1 sistem		1 sistem	100%	1 sistem	1 sistem	
				Akurasi data melalui SIMPEG online di 113 SKPD dan 5 Kab/kota			118 SKPD		118 SKPD	100%	118 SKPD	118 SKPD	
1.	2	08.0	33.06	Pelayanan pengurusan Taperum			66 orang		66 orang	100%	100 orang	66 orang	
		0.	3.	Peningkatan penghargaan aparatur melalui penyerahan satyalancana		550 orang	533 orang		533 orang	100%	530 orang	533 orang	
				Peningkatan kinerja aparatur melalui pengembangan aplikasi SKP dan penilaian kinerja		1 aplikasi	4 aplikasi		4 aplikasi	100%	1 aplikasi	4 aplikasi	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Peningkatan kesejahteraan aparatur melalui pertandingan olahraga		5 cabang	5 cabang		5 cabang	100%	5 cabang	5 cabang	
				Pengiriman kontingen MTQ		4 cabang	3 cabang		3 cabang	100%	3 cabang	3 cabang	
				Peningkatan penilaian kinerja melalui penilaian kinerja instansi dan aparatur		4 kali	4 kali		4 kali	100%	4 kali	4 kali	
				Pelayanan pengurusan jKK dan JKM		10 orang	16 orang		16 orang	100%	25 orang	16 orang	
				Peningkatan penghargaan aparatur melalui pengusulan Satyalancana		550 orang	396 orang		396 orang	100%	400 orang	396 orang	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Peningkatan pemahaman penilaian kinerja aparatur		600 orang	660 orang		660 orang	100%	660 orang	660 orang	
1.	2	08.0	33.06	Peningkatan pembinaan aparatur mll pengisian JPT		5 JPT	9 JPT		9 JPT	100%	5 JPT	9 JPT	
				Peningkatan pembinaan aparatur mll penyelesaian naskah kepegawaian ttg pengangkatan dan pemberhentian dari/ke jabtan struktural, fungsional dan fungsional umum		1.000 naskah	3.630 naskah		3.630 naskah	100%	1.000 naskah	3.630 naskah	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2	08.0	33.06	Pengembangan aparatur melalui pembekalan bagi aparatur yang akan memasuki masa pensiun		400 orang	450 orang		450 orang	100%	400 orang	450 orang	
				Peningkatan pembinaan aparatur		400 orang	432 orang		432 orang	100%	400 orang	432 orang	
1.	2	08.0	33.06	Peningkatan pembinaan aparatur melalui pengelolaan naskah kepegawaian ttg pengangkatan, pemindahan aparatur antar daerah		500 naskah	412 naskah		412 naskah	100%	200 naskah	412 naskah	
				Peningkatan pembinaan aparatur melalui penanganan alih status guru dan pegawai			6.695 orang		6.695 orang	100%	5.000 orang	6.695 orang	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2	08.0	33.06	Tersedia aplikasi arsip elektronik		1 aplikasi	1 aplikasi		1 aplikasi	100%	1 aplikasi	1 aplikasi	
		0.	9.	Peningkatan pengelolaan arsip dokumen file perorangan PNS dan arsip dokumen		7.500 arsip	8.236 arsip		8.236 arsip	100%	7.500 arsip	8.236 arsip	
				Pengelolaan arsip kolektif PNS		400 arsip	433 arsip		433 arsip	100%	400 arsip	433 arsip	
				Tersedia dokumen keeper		7.000 buah	7.500 buah		7.500 buah	100%	7.500 buah	7.500 buah	
				Tersedianya scanner			2 unit		2 unit	100%	2 unit	2 unit	
				Tersedia compact rolling			4 unit		4 unit	100%	4 unit	4 unit	
1.	2	08.0	57.00	Peningkatan kapasitas aparatur melalui sertifikasi mutu layanan		1 lap	1 lap		1 lap	100%	1 lap	1 lap	
	0.	0.	1.										

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendampingan sistem manajemen mutu		1 lap	1 lap		1 lap	100%	1 lap	1 lap	
1.	2	08.0	57.00	Peningkatan kapasitas aparatur melalui pengiriman dalam Diklatpim Tk. II		4 orang	5 orang		5 orang	100%	4 orang	5 orang	
				Peningkatan kapasitas aparatur melalui pengiriman dalam tugas belajar		75 orang	165 orang		165 orang	100%	90 orang	165 orang	
				Peningkatan kapasitas aparatur melalui pengiriman dalam diklat teknis fungsional		250 orang	388 orang		388 orang	100%	283 orang	388 orang	
				Peningkatan kapasitas aparatur melalui seleksi mahasiswa IPDN		1 seleksi	1 seleksi		1 seleksi	100%	1 seleksi	1 seleksi	

Tahun anggaran 2017, Badan Kepegawaian Daerah DIY melaksanakan 22 kegiatan dari 6 program. Program dan kegiatan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;**
 - a. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran;
 - b. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran;
 - c. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.

- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;**
 - a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
 - b. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor;
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan;
 - d. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional.

- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur.

- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Keuangan**
 - a. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
 - c. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi;
 - d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD.

- 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**
 - a. Pengukuran Kompetensi Pegawai;
 - b. Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur;
 - c. Penegakan Disiplin Aparatur;
 - d. Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur;
 - e. Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun;
 - f. Pengelolaan Sistem Informasi serta Dokumentasi Aparatur;
 - g. Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur.

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemda

- a. Pengembangan Profesionalisme Aparatur;
- b. Pengembangan Sertifikasi Layanan Mutu;
- c. Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi.

C. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Peluang

- a. Pemerintah Daerah DIY sering dijadikan sebagai *pilot project* dalam kebijakan penanganan kepegawaian sehingga menjadikan Badan Kepegawaian Daerah DIY sebagai salah satu tujuan studi banding dalam manajemen kepegawaian daerah bagi daerah lain;
- b. Banyaknya tawaran kerjasama dalam pengukuran kompetensi bagi calon Pejabat struktural baik instansi di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta swasta;
- c. Banyaknya tawaran diklat baik yang bersifat kedinasan maupun diklat teknis fungsional dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan swasta;
- d. Adanya kewenangan yang lebih luas dalam penanganan kepegawaian di daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah dengan pengakuan keistimewaan yang ada di DIY;
- e. Penyimpanan file dan arsip kepegawaian yang telah terpadu dalam satu gedung untuk memudahkan dalam pengelolaan;
- f. Sistem informasi tentang data kepegawaian yang sudah mengalami kemajuan pesat dengan adanya aplikasi memudahkan pegawai untuk mengakses data kepegawaian dengan lebih cepat dan akurat.

2. Tantangan

- a. Belum tersusunnya perencanaan PNS yang komprehensif, *integrated* dan berbasis kinerja;
- b. Pengadaan PNS yang secara kualitas dan kuantitas belum sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan;

- c. Banyaknya sumber daya aparatur yang belum memenuhi standar kompetensi jabatan dan penempatan PNS yang belum berdasar pada kompetensi jabatan;
- d. Belum optimalnya penyelesaian kenaikan pangkat sehingga masih ada kesenjangan dalam penyelesaian tepat waktunya;
- e. Belum optimalnya penyelesaian pensiun pegawai;
- f. Belum adanya pola karir PNS yang dijadikan acuan dalam pengembangan karir PNS;
- g. Belum dilaksanakannya mutasi/rotasi pegawai secara berkala sesuai dengan perundangan yang berlaku;
- h. Adanya anggapan instansi basah dan instansi kering yang merupakan cerminan masih belum meratanya distribusi kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah DIY sehingga diperlukan pengembangan sistem *reward and punishment*;
- i. Banyaknya tawaran peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dalam negeri maupun luar negeri yang belum ditindaklanjuti;
- j. Diklat PNS belum optimal dalam meningkatkan kompetensi;
- k. Penetapan peraturan disiplin pegawai belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen;
- l. Belum optimal dan terintegrasinya aplikasi teknologi informasi (TI) dan sistem informasi (SI) kepegawaian sebagai dukungan dalam penyediaan bahan kebijakan di bidang kepegawaian.
- m. Penyelenggaraan seleksi terbuka dalam pengisian jabatan pejabat Eselon I dan II sebagai amanat dari Undang-undang ASN, sehingga menuntut keeterbukaan informasi serta independensi dalam pelaksanaannya

D. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

1. Telah dilakukan redesign di tahun 2015 di mana kegiatan utama yang dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta disesuaikan kembali sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Redesign yang dilakukan menimbulkan banyak masalah baru dengan adanya pengelompokan kegiatan yang ternyata lintas bidang sehingga menyulitkan untuk koordinasi, serta tanggung jawab dalam penunjukkan PPTAKnya.
3. Adanya kebijakan yang menyebabkan kegiatan yang sudah dianggarkan tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Kebijakan ini menyebabkan adanya keraguan serta kebingungan dalam mensikapinya, akan dianggarkan kembali atau tidak dianggarkan, seperti di kegiatan perencanaan dan pengadaan aparatur.
4. Kurun waktu untuk kegiatan yang sifatnya mendesak oleh kebijakan Pemerintah pusat sering terjadi angka besarnya dana tidak selalu tepat dan sering kali kurang dan penangannya belum maksimal, dimana dengan dana yang ada SKPD dituntut untuk bisa memanfaatkan semaksimal mungkin meskipun kemungkinan kurang sangat besar.
5. Kebijakan di tahun 2016 sudah dikembalikan kepada tugas fungsi masing-masing bidang untuk lebih memudahkan koordinasi, namun masih ada yang tidak disetujui oleh TAPD, yaitu di kegiatan penegakan disiplin dan juga pengembangan sistem informasi kepegawaian yang ternyata masih diampu oleh lintas bidang.
6. Untuk tahun 2017, sudah kembali dilakukan rasionalisasi dan penataan kembali program kegiatan sesuai tugas fungsi masing-masing bidang dan juga relevansi biaya dalam analisis standar belanja yang lebih logis.
7. Tahun 2018 penataan kelembagaan baru dengan melakukan *talent pool* untuk memperoleh data-data kompetensi pegawai dalam rangka regenerasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Badan Kepegawaian Daerah DIY yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pembentukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
4. pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. perlindungan dan pengembangan kebudayaan untuk sumberdaya manusia aparatur;
6. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; dan

7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN dan SASARAN RENJA SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH

1. Tujuan

Tujuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 sesuai permasalahan yang ada, dapat diformulasikan dari isu strategis bidang kepegawaian yang ada yaitu :

" Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan Publik Secara Profesional"

2. Sasaran

Sasaran pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

" Meningkatkan kualitas manajemen aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional"

Dari sasaran yang ada, maka dapat diuraikan juga yang menjadi visi, misi serta strategi yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencapai tujuan.

Visi Misi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan dan merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi misi Gubernur dalam RPJMD DIY Tahun 2017 - 2022 yakni **"Menyongsong Abad Samudera Hindia Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"**.

Strategi

Strategi untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah DIY dirumuskan *grand design*

pengelolaan manajemen kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, meliputi :

1. Meningkatkan Sistem Rekrutmen Pegawai

Pada masa mendatang perlu dipersiapkan pembenahan dalam sistem perekrutan pegawai. Sistem diawali dengan penyusunan pedoman pengadaan pegawai sesuai dengan peraturan dan berdasarkan kompetensi, perumusan dan penyusunan formasi yang tepat sesuai dengan analisis kebutuhan pegawai. Mekanisme ini akan menghasilkan acuan atau pedoman dalam pengadaan pegawai.

Saat ini tengah terjadi kesenjangan dalam komposisi pegawai yang ada. Sementara kebijakan formasi dari Pemerintah Pusat terkadang tidak sesuai dengan usulan formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah. Akibatnya, Daerah cenderung mengalami kekurangan pegawai untuk kualifikasi jabatan dan golongan tertentu. Kebijakan Moratorium Penerimaan CPNS juga menuntut Pemerintah Daerah untuk melaksanakan redistribusi dan penataan kembali atas pegawai yang menjadi kewenangannya, melakukan analisis beban kerja, melakukan evaluasi kelembagaan serta menyusun proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun ke depan (2013-2017). Proyeksi kebutuhan pegawai yang dihasilkan akan menginformasikan jumlah pegawai yang dibutuhkan daerah untuk mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan secara optimal.

Secara kuantitas, jumlah sumber daya aparatur (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan pelayanan juga dirasakan sangat minim, yaitu dengan formasi yang dibutuhkan sekitar 16.608 orang, hanya tersedia 16.232 orang. Setiap tahun terjadi pengurangan jumlah karena pensiun. Sementara komposisi pegawai mulai menunjukkan adanya ketidakseimbangan pada golongan tertentu. Hal ini apabila tidak diimbangi dengan perekrutan pegawai baru akan berpengaruh terhadap kinerja aparatur di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi ini juga diperparah dengan kualitas pendidikan mereka yang

masih rendah. Ketidakseimbangan antara jumlah PNS dengan jumlah penduduk yang dilayani menyebabkan perlu dilakukan pembenahan dalam sistem rekrutmen pegawai.

Melakukan rekrutmen pegawai non PNS kontrak untuk mengurangi permasalahan semakin berkurangnya jumlah pegawai dikarenakan purna tugas dan mengatasi kesenjangan jumlah pegawai dikarenakan kebijakan pemerintah pusat terkait moratorium penerimaan CPNS. Kebijakan rekrutmen non PNS kontrak sudah dilakukan sejak tahun 2016.

2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilaksanakan dengan strategi berikut:

- a) Analisis Kebutuhan Diklat dilaksanakan setiap tahun dengan memperhatikan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan kemanfaatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur. Penguatan peran Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan seleksi calon peserta baik seleksi diklat teknis maupun diklat formal, merupakan suatu kebutuhan dalam mendukung peran dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait dengan peningkatan profesionalisme aparatur. Banyaknya penawaran diklat dan beasiswa, dari berbagai lembaga penyelenggara diklat baik dalam maupun luar negeri memberikan peluang yang terbuka bagi aparatur untuk meningkatkan profesionalitasnya, namun demikian, perlu diupayakan filter agar pilihan diklat dan peserta diklatnya tidak jauh berbeda dengan perencanaan diklat dan kebutuhan organisasi.
- b) Pemberian kesempatan dan fasilitasi bantuan biaya tugas belajar dan diklat lain-lain untuk mengirimkan aparatur dalam pendidikan dan latihan baik yang bersifat kedinasan (gelar) maupun diklat teknis fungsional (non gelar) serta melakukan sosialisasi dan fasilitasi atas tawaran kerjasama penyelenggaraan diklat bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengiriman aparatur dalam tugas belajar dan ikatan dinas dengan mempertimbangkan formasi kebutuhan yang ada.

- c) Pengikutsertaan aparatur dalam pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan kepemimpinan bagi aparatur untuk meningkatkan wawasan, kapasitas, kompetensi dan kinerja pegawai serta mendukung keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengiriman aparatur dalam pendidikan pelatihan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan, kompetensi serta perubahan pola pikir, moral dan perilaku aparatur.
- d) Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam implementasi peraturan perundangan di bidang kepegawaian, yaitu dalam rangka pemahaman atas peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sehingga tidak ada salah tafsir.
- e) Pengembangan sumber daya Pengelola Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan mewujudkan lembaga pengukuran kompetensi pegawai yang handal dan berdaya saing, dengan dilakukan berbagai macam pelatihan assessor, magang serta meningkatkan promosi Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai.

3. Menempatkan Pegawai sesuai dengan Kompetensi

Pelaksanaan penempatan PNS dalam jabatan berdasarkan prinsip "*menempatkan orang yang tepat dalam jabatan yang tepat*" sesuai dengan kompetensi serta kualifikasi yang dimiliki. Penerapan prinsip ini memerlukan alat yang bisa mengenali kompetensi PNS dan alat untuk menetapkan standar kompetensi jabatan. Penempatan dan distribusi PNS dalam Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu mempertimbangkan hasil pemetaan jabatan dan formasi. Sedangkan penempatan dan distribusi PNS dalam jabatan mempertimbangkan hasil penilaian potensi sesuai rekomendasi hasil Tes Psikologi maupun hasil Assessment Center tanpa mengabaikan hak-hak PNS sesuai dengan nilai-nilai demokratis, transparansi dan keadilan. Rekomendasi ini

mengacu pada analisis jabatan yang akuntabel terutama menyangkut kualifikasi pegawai meliputi pendidikan, diklat teknis serta penjangkaran minat dan bakat pegawai. Penempatan seseorang dalam jabatan diharapkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi, bakat, kemampuan, peminatan pegawai, kebutuhan instansi dan juga kinerja pegawai. Pada masa mendatang, adanya rencana perubahan manajemen kepegawaian akan membawa konsekuensi pada penataan personil pada jabatan yang baru maupun pemenuhan kelembagaan yang terbentuk.

Peranan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan penilaian yang memadai. Pegawai yang akan ditempatkan dalam jabatan tertentu merupakan pegawai yang benar-benar telah diseleksi secara obyektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip *merit system*, yaitu pegawai-pegawai yang memenuhi persyaratan dalam manajemen suksesi.

Setiap tahun perlu senantiasa diupayakan rotasi pegawai secara berkala sebagai upaya penyegaran kerja dan peningkatan wawasan dan keahlian kerja. Rotasi pegawai dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelusuran kemampuan kerja dan keinginan setiap PNS sesuai prinsip *The Ability-Job fit and The Personality-Job Fit* (Robbins, 2000). Untuk kepuasan dan efektivitas kerja perlu ada kesesuaian antara kemampuan dan jenis kepribadian kerja dengan kualifikasi pegawai yang akan dirotasi.

4. Mengembangkan pola karir PNS

Keberadaan pedoman dan *guidance* penyusunan pola karir secara nasional dan institutional perlu menjadi prioritas. Draft pola karir perlu dikembangkan dan dirumuskan sebagai pedoman pola karir PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pola karir akan menjadi pedoman atau *guidance* yang jelas tentang perjalanan karir PNS di lingkungan Pemerintah Daerah DIY sejak menjadi CPNS sampai pensiun. Adanya pola karir yang jelas akan mendorong PNS untuk terus meningkatkan prestasi kerjanya. Dan pola karir merupakan bagian yang tidak terpisahkan prinsip-prinsip dalam *merit system*.

5. Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai

Dalam rangka memperbaiki tingkat kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, selama kurun waktu ini akan dilaksanakan pemberian tunjangan tambahan penghasilan sesuai dengan prestasi kerja berdasarkan pada kinerja individu dan instansi bagi PNS dan PTT di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemberian tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kinerja merupakan wujud penghargaan atau *reward* bagi PNS sesuai dengan kinerjanya. Penghargaan bagi PNS berupa pemberian penghargaan Satyalencana Karya Satya (dengan perhitungan per 10, 20 dan 30 tahun masa kerja).

Selain diberikan tunjangan tambahan penghasilan tersebut, setiap tahunnya juga diupayakan peningkatan kesejahteraan jasmani melalui pembinaan kegiatan olahraga bagi PNS, fasilitasi JKK/JKM yaitu pemberian bantuan perawatan bagi PNS/PTT yang sakit atau meninggal karena tugas sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Pemberian kesejahteraan jasmani dan pelayanan kesehatan bagi PNS/PTT merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap sumber daya aparaturnya.

6. Membentuk PNS yang berkarakter dan melestarikan budaya

Pembentukan karakter PNS yang berbudaya dapat dimulai sejak CPNS pengembangan ketika sudah menjadi PNS. Karakter ini dimaksudkan untuk memperkuat jati diri bangsa dan mendukung keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam aspek sumber daya aparatur. Dukungan dalam aspek kebudayaan yakni dengan pengungkapan kembali kebudayaan lokal untuk pelestariannya di lingkungan PNS Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini diwujudkan dengan pemakaian pakaian tradisional Yogyakarta setiap Kamis Pahing dan juga hari-hari khusus lainnya yang telah diatur dengan Peraturan Gubernur

dan penggunaan bahasa daerah dalam acara kedinasan setiap hari jum'at yang telah ditetapkan juga dalam Peraturan Gubernur.

7. Mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian secara terintegrasi

Sistem Informasi Kepegawaian dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai layanan di bidang kepegawaian, namun pengembangan sistem ini belum optimal. Data dan informasi kepegawaian yang akurat dibutuhkan sebagai bahan perumusan kebijakan di Bidang Kepegawaian. Kemudian belum tersedianya portal khusus kepegawaian yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah, menjadikan *updating* data yang seharusnya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah masih bergantung pada instansi lain, sehingga memperbesar terjadinya potensi kesenjangan dalam validitas data. Selanjutnya belum terhubungnya /*ter-link*-nya sistem informasi kepegawaian dengan instansi baru dan instansi terkait terutama dengan instansi-instansi pengelola kepegawaian seperti BKN dan Badan Kepegawaian Daerah Kota dan Kabupaten.

Integrasi SAPK dan SIMPEG tidak mudah, karena struktur data masing-masing daerah tidak sama. Saat ini tengah dilakukan penyetaraan struktur data dengan data BKN. Antisipasi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan sinkronisasi data dari SIMPEG ke SAPK untuk menjembatani perbedaan data BKN dengan data yang ada.

Permasalahan tersebut menjadi dasar perencanaan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi, Sistem Informasi Kepegawaian akan dikembangkan secara bertahap agar sesuai pemanfaatannya. Sehingga sistem ini akan mampu menyediakan informasi yang akurat serta *up to date* bagi pengambilan kebijakan.

8. Meningkatkan mutu layanan dan jejaring kerja Balai PKP

Lembaga pengukuran kompetensi di daerah lain telah mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini memacu lembaga sejenis untuk senantiasa mengembangkan diri untuk meraih pangsa pasar dan menghadapi

persaingan. Tahap awal perlu dilakukan penguatan kelembagaan dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan. Tahap selanjutnya diikuti dengan pembenahan manajemen, pembenahan metode pemasaran agar efektif serta mengembangkan jejaring untuk mencapai pasar yang lebih luas.

Pembenahan manajemen dimaksudkan untuk menjaga konsistensi sistem dan prosedur serta peningkatan kualitas layanan dan produk yang dihasilkan. Sebagai bahan pengambilan kebijakan, produk pengukuran kompetensi dituntut memiliki tingkat akurasi, relevansi dan kehandalan yang tinggi. Pengembangan Balai PKP diupayakan melalui kaderisasi dan peningkatan kualitas Assessor, pengembangan alat ukur, peningkatan sarana prasarana serta penguatan jejaring kemitraan dengan daerah lain secara bertahap dan berkelanjutan.

9. Pelaksanaan Sistem Kenaikan Pangkat

Adanya kesenjangan dalam penyelesaian pelayanan kenaikan pangkat bagi PNS merupakan tantangan yang harus diselesaikan. Perbaikan pelayanan senantiasa harus dilakukan antara lain dengan melakukan koordinasi intensif dengan BKN RI maupun BKN Regional sebagai mitra kerja dalam penyelesaian kenaikan pangkat PNS. Untuk mempertahankan konsistensi pelayanan, perlu penjagaan *bezeeting* yang terintegrasi antar instansi disertai optimalisasi fungsi Sistem Informasi Kepegawaian yang sudah ada. Pada fase ini akan dioptimalkan peran Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) untuk mendukung layanan kenaikan pangkat bagi PNS. Pemanfaatan Sistem yang didukung oleh akurasi data kepegawaian yang terintegrasi akan memudahkan proses layanan. Sehingga diharapkan semua usulan kenaikan pangkat dapat selesai pada waktunya.

Pemberian kenaikan pangkat bagi PNS pada masa mendatang akan lebih mempertimbangkan kualifikasi persyaratan jabatan formasi dan kebutuhan organisasi, artinya seorang PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam pangkat dan golongan lebih tinggi dapat diangkat selama formasinya ada dan memungkinkan, untuk

mendukung hal ini, ke depan akan disusun persyaratan dan kualifikasi jabatan pada setiap jenis jabatan dengan mensyaratkan golongan dan pangkat yang ditentukan sesuai dengan beban kerjanya. Dengan diberlakukannya kebijakan ini diharapkan kedepan komposisi PNS yang belum ideal, diharapkan secara bertahap mendekati ke bentuk idealnya. Sementara itu, keterlambatan SK pengangkatan bagi PNS golongan IV/c ke atas dikarenakan birokrasi dari BKN RI dan juga koordinasi ke Sekretariat Negara memang prosesnya lebih lama. Keterlambatan ini sendiri sudah diantisipasi dengan pengajuan lebih awal, namun kendala keterlambatan ini belum sepenuhnya bisa dihindari tapi keterlambatan hanya bisa dikurangi.

10. Meningkatkan Pengelolaan Pensiun PNS

Belum optimalnya sistem informasi kepegawaian menjadi salah satu penyebab masih adanya kesenjangan dalam penyelesaian pensiun PNS/PTT. Perlu *bezeeting* PNS calon pensiun secara akurat sehingga terinformasikan data semua pegawai yang akan memasuki masa pensiun. Hal ini dapat meminimalkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pensiun yang akan merugikan pegawai calon pensiun. Pemanfaatan SAPK juga sangat mendukung layanan pengelolaan pensiun bagi PNS.

Pembekalan bagi PNS calon pensiun akan dilaksanakan secara reguler dan pembekalan kewirausahaan bagi PNS calon pensiun. Pembekalan reguler dititikberatkan pada pemberian pengetahuan pada aspek administratif dan psikologis PNS calon pensiun. Pembekalan dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan administrasi berkaitan dengan dokumen kelengkapan pensiun serta diberikan wawasan lain sebagai bekal kesiapan menghadapi masa purna tugas. Sedangkan pembekalan kewirausahaan dilakukan dengan penjangkaran minat dan bakat pegawai calon pensiun. Pelaksanaan pembekalan kewirausahaan bagi PNS calon pensiun diharapkan sesuai dengan minat dan ketertarikan pegawai calon pensiun yang tentunya akan berguna sebagai bekal pegawai untuk menghadapi masa pensiunnya. Pada kurun

waktu tertentu akan dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan ini.

11. Meningkatkan Sarana Prasarana

Sudah terbangunnya gedung arsip kepegawaian yang juga telah difungsikan. Untuk selanjutnya sudah dilakukan kegiatan DED Pembangunan gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY dan juga penyempurnaannya di tahun 2015 dan tahun 2016. Untuk pelaksanaan pembangunan gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY masih menunggu persetujuan TAPD dan juga kondisi keuangan daerah. Tahun 2017 yang sedianya sudah mulai dilakukan terkendala oleh kondisi keuangan daerah yang mengalami perencanaan defisit. Tahun 2018 direncanakan untuk diusulkan pembangunan gedung, hal ini mengingat DED pembangunan gedung sudah dibuat dari tahun 2015, namun pembangunan belum bisa dilakukan karena terkendala keterbatasan dana dari APBD.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program yang diusulkan pada tahun 2018 meliputi 8 program yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Perencanaan, Pengadaan Pegawai dan Pengelolaan Data Kepegawaian;
5. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Pengembangan Karir Pegawai;
6. Program Pembinaan Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai;
7. Program Peningkatan Penatausahaan Kepegawaian Daerah;
8. Program Pengelolaan Pengukuran Kompetensi Pegawai.

Rencana Kegiatan yang diusulkan pada tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari 8 program dan 21 Kegiatan adalah sebagai berikut ini :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;**
 - a. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran;
 - b. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran;
 - c. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;**
 - a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
 - b. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor;
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan;
 - d. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional.

3. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Keuangan**
 - a. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
 - c. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi;
 - d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD.

4. **Program Perencanaan, Pengadaan Pegawai dan Pengelolaan Data Kepegawaian**
 - a. Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur;
 - b. Pengelolaan Sistem Informasi serta Dokumentasi Aparatur.

5. **Program Peningkatan Kualitas SDM dan Pengembangan Karir Pegawai**
 - a. Penegakan Disiplin Aparatur;
 - b. Pengembangan Profesionalisme Aparatur;
 - c. Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur.

6. **Program Pembinaan Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai**
 - a. Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur;
 - b. Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun.

7. **Program Peningkatan Penatausahaan Kepegawaian Daerah**
 - a. Pengelolaan Sertifikasi Layanan Mutu.
8. **Program Pengelolaan Pengukuran Kompetensi Pegawai**
 - a. Pengukuran Kompetensi Pegawai;
 - b. Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi.

Lokasi Program dan Kegiatan :

8 Program dan 21 Kegiatan pada tahun anggaran 2018 dilaksanakan di Yogyakarta direncanakan dan diusulkan ke Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY sebesar :

Belanja Tidak Langsung	Rp. 158.919.583.656,-
Belanja Langsung	Rp. 14.428.911.000,-
Jumlah	Rp.173.339.494.656,-

(Seratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)

INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2012 -2017, Indikator Kinerja Utama dari Badan Kepegawaian Daerah DIY yang dijabarkan dalam masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Perencanaan, Pengadaan Pegawai dan Pengelolaan Data Kepegawaian**
 - a. Tercapainya pemenuhan pegawai hasil rekrutmen 400 orang;
 - b. Tertanganinya dokumen kepegawaian yang terintegrasi 20.500 SK;

- c. Penanganan arsip file kepegawaian perorangan dan kolektif sebanyak 300 Sk;
- d. Dokumen kepegawaian peralihan kewenangan 6.500 dokumen;
- e. Ketepatan data simpeg dengan kondisi factual terhadap seluruh aparatur Pemda DIY 100%;

2. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Pengembangan Karir Pegawai

- a. Penurunan kasus-kasus pelanggaran hukuman disiplin PNS dari 15 kasus menjadi 14 kasus;
- b. Terkirimnya PNS dalam diklat baik pengiriman diklat keluar maupun penyelenggaraan diklat di Badiklat terhadap 610 orang.

3. Program Pembinaan Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai

- a. Terfasilitasinya JKK/JKM 10 orang;
- b. Terlaksananya lomba olahraga ASN DIY 5 cabang lomba dan MTQ ASN DIY 4 cabang lomba;
- c. Pemberian penghargaan satya lancana karya satya terhadap 400 orang;
- d. Peningkatan kinerja organisasi dan aparatur sebanyak 4 kali.
- e. Tertanganinya kenaikan pangkat yang akurat dan tepat waktu kepada 3.000 orang;
- f. Tertanganinya pemensiunan pegawai yang akurat dan tepat waktu sebanyak 1.000 orang.

4. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Pengembangan Karir Pegawai

- a. Tercapainya peningkatan layanan aparatur dengan adanya laporan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui sertifikasi layanan mutu laporan, yaitu 1 laporan hasil audit layanan aparatur;

5. Program Pengelolaan Pengukuran Kompetensi Pegawai

- a. Terlaksananya pengukuran profil kompetensi aparatur Pemda dan luar Pemda DIY sebanyak 760 orang;
- b. Terlaksananya pengukuran profil potensi jumlah aparatur/profesional Pemda dan Luar Pemda DIY 860 orang;

- c. Tercapainya kesepakatan pengukuran kompetensi pegawai 2 kesepakatan;
- d. Tercapainya peningkatan kapasitas assessor dengan berbagai diklat assessor dan non assessor;
- e. Tercapainya peningkatan kapasitas dengan pelaksanaan sertifikasi profesi yang ada di lingkungan Pemda DIY.

Kelompok Sasaran Kegiatan

Kelompok sasaran program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:

1. PNS dan CPNS Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
2. PNS Kabupaten/Kota
3. Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Instansi mitra kerja
5. Instansi Vertikal
6. PNS di luar Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Masyarakat umum
8. Barang-barang inventaris Daerah
9. Lingkungan kantor
10. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang penyusunannya telah mengacu pada dokumen RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Penjabaran ini diharapkan dapat menjadi pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Tahun 2018.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik.

Program dan Kegiatan KUA/PPAS 2018

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY

No	Nama Program	Kegiatan	Kegiatan 2018	Keluaran Tolok Ukur	Target
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Rp 1,544,461,040.00	Peralatan dan perlengkapan kantor 25 jenis,	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%
				Peralatan rumah tangga 19 jenis,	
				Bahan bacaan 2 surat kabar,	
				Barang cetakan 21 jenis dan penggandaan 60.000 lbr	
				Jasa kebersihan kantor 1 tahun,	
				Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan,	
				Jasa surat menyurat 1 tahun,	
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 24 jenis,	
				Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional roda dua 4 unit dan roda empat 7 unit,	
				Alat Tulis kantor 93 jenis,	
				Pengelolaan arsip dinamis 6 bidang,	
Fumigasi Arsip 3 ruang					
2	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Rp 331,073,000.00	Kinerja 15 orang pengelola keuangan,	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%
				Pengelola kepegawaian dan pengelola barang selama 1 tahun;	
				Kinerja 9 orang tenaga keamanan kantor/gedung/tempat kerja selama 1 tahun	
3	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Rp 400,000,000.00	Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu selama 1 tahun;	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah selama 1 tahun	
				Bendera dan umbul-umbul 26 buah;	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%
				Rak arsip 4 buah);	
				Filling kabinet 5 buah,	
				Almari besi 2 buah;	
				Mebeleur Balai PKP (Almari arsip kaca 3 buah, Meja kursi tamu 1 buah);	

No	Nama Program	Kegiatan	Kegiatan 2018	Keluaran Tolok Ukur	Target
4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Rp 208,474,000.00	Perlengkapan kantor Balai PKP (Koper besar 1 buah, Bantal guling 10 buah, Sprei dan sarung bantal 5 buah, Bed cover batik 5 buah, Taplak meja 24 buah, Serbet makan 12 buah);	
				PC branded 5 unit,	
				Notebook 5 unit,	
				Printer 5 unit,	
				Mesin fax 1 unit,	
				Scanner 1 unit	
				LCD Projector Balai PKP 1 unit	
Kulkas Balai PKP 1 unit					
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Rp 665,864,000.00	Pemeliharaan taman 1 tahun	Terpelihara rumah dan gedung kantor 100%
				Pemeliharaan gedung kantor 1 tahun	
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 159,195,000.00	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (roda empat dan roda dua) selama 1 tahun	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%
7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Rp 24,612,400.00	Pemeliharaan mebeleur 1 tahun;	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kenutuhan 100%
				Pemeliharaan perlengkapan kantor 1 tahun;	
				Pemeliharaan peralatan kantor 1 tahun	
8	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Rp 10,000,000.00	LKJ-IP Tahun 2017 1 laporan	Nilai LKJ-IP A
9	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Rp 36,668,750.00	Laporan keuangan bulanan 12 laporan;	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%
				Laporan keuangan semesteran dan porgnosis 1 laporan ;	
				Laporan keuangan tahunan 1 laporan	
				Renstra SKPD	1 dokumen
				DPA 2019 1 dokumen, DPPA 2018 1 dokumen	Dokumen perencanaan 2019 dan perubahan 2018

No	Nama Program	Kegiatan	Kegiatan 2018	Keluaran Tolok Ukur	Target
10	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Rp 145,000,000.00	Publikasi Website	Pembaharuan publikasi informasi BKD secara kontinyu 100%
				Renja SKPD	1 dokumen
				RKA	1 dokumen
				RKT dan PK	2 dokumen
				ROPK	1 dokumen
11	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Rp 25,832,000.00	Laporan program dan kegiatan bulanan 12 laporan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%
12	PROGRAM PERENCANAAN, PENGADAAN PEGAWAI DAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur	Rp 1,600,000,000.00	Memenuhan kebutuhan pegawai untuk mengisi formasi yang kosong	400 orang
				Formasi dan proyeksi kebutuhan pegawai	2 dokumen
13	PROGRAM PERENCANAAN, PENGADAAN PEGAWAI DAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	Pengelolaan Sistem Informasi serta Dokumentasi Aparatur	Rp 987,265,000.00	Arsip dokumen file perorangan	7500 arsip
				Arsip dokumen kolektif	400 SK kolektif
				Penyediaan backup data pegawai	Data terintegrasi, valid dan update 100%
14	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI	Penegakan Disiplin Aparatur	Rp 632,272,300.00	Laporan disiplin pegawai	1 laporan
				Penurunan kasus pelanggaran hukum selama tahun 2018 (14 kasus 2017 menjadi 13 kasus)	100%
				Pengadaan Mesin presensi	35 unit mesin presensi
				Pemeliharaan mesin presensi	244 unit mesin presensi
				Penetapan hukum pegawai	100%
15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI	Pengembangan Profesionalisme Aparatur	Rp 3,489,993,910.00	SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi kediklatan	Terkirimnya PNS dalam diklat dan mengikuti diklat 100% (350 orang)
				SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi pendidikan	Terpenuhinya standar pendidikan pegawai 100%
16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI	Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur	Rp 1,500,000,000.00	Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 6 JPT	100
				Pengisian jabatan administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV dan V), dan Kepala Sekolah 300 jabatan	100%
				Pengisian jabatan fungsional 300 jabatan	100%
				Pengisian jabatan pelaksana 300 jabatan	100%

No	Nama Program	Kegiatan	Kegiatan 2018	Keluaran Tolok Ukur	Target
				Perpindahan aparatur dan alih status PNS 100 PNS	100%
17	PROGRAM PEMBINAAN KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur	Rp 1,492,652,100.00	Fasilitasi JKK/JKN	10 orang
				Lomba MTQ	4 cabang lomba
				Lomba olah raga ASN Pemda DIY	5 cabang lomba
				Penghargaan Satyalancana Karya Satya	550 orang
				Peningkatan kinerja organisasi dan aparatur (hasil penilaian TPP)	4 kali
18	PROGRAM PEMBINAAN KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun	Rp 465,000,000.00	Rakor Kenaikan Pangkat Terpadu	2 Periode
				Kenaikan pangkat akurat dan tepat waktu	900 PNS
				Pembekalan PNS calon pensiun	700 PNS
				Pemensiunan pegawai akurat dan tepat waktu	700 PNS
19	PROGRAM PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengelolaan Sertifikasi Layanan Mutu	Rp 125,000,000.00	Layanan pelanggan meningkat melalui sertifikasi layanan mutu 1 laporan	Tercapainya peningkatan layanan aparatur 100%
20	PROGRAM PENGELOLAAN PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI	Pengukuran Kompetensi Pegawai	Rp 1,800,000,000.00	Profil kompetensi luar dan dalam DIY	760 orang
				Profil potensi luar dan dalam DIY	860 orang
21	PROGRAM PENGELOLAAN PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI	Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi	Rp 446,937,500.00	Kesepakatan kerjasama pengukuran kompetensi 2 kesepakatan	Tercapainya kesepakatan kerjasama pengukuran kompetensi 100%
				Meningkatnya kompetensi sumber daya assessor melalui diklat dan pelatihan	Tercapainya peningkatan kapasitas assessor 100%
			Rp 16,090,301,000.00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 16.090.301.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan											
4.06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
4.06.1.20.08.00	Badan Kepegawaian Daerah											
4.06.1.20.08.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 2.275.534.040,00	Rp. 2.340.000.000,00		
4.06.1.20.08.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Peralatan dan perlengkapan kantor 25 jenis, Peralatan rumah tangga 1 9 jenis, Bahan bacaan 2 surat kabar, Barang cetakan dan penggandaan, Jasa kebersihan kantor 1 tahun, Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan, Jasa surat menyurat 1 tahun, Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 24 jenis, Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional roda dua 5 unit dan roda empat 7 unit, Alat Tulis kantor 93 jenis, Pengelolaan arsip dinamis 6 bidang, Fumigasi Arsip 3 ruang	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 65% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.544.461.040,00	Rp. 1.600.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.1.20.08.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Kinerja 14 orang pengelola keuangan, pengelola kepegawaian dan pengelola barang selama 1 tahun; Kinerja 9 orang tenaga keamanan kantor/gedung/tempat kerja selama 1 tahun	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 14% terhadap administrasi perkantoran yang mencukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 331.073.000,00	Rp. 335.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 16.090.301.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.06.1.20.08.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu selama 1 tahun; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 20% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 405.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.1.20.08.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 1.058.145.400,00	Rp. 1.035.000.000,00		
4.06.1.20.08.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Bendera dan umbul-umbul 26 buah; Mebeleur (Almari besi 2 buah, Filling kabinet 5 buah, Rak arsip 4 buah); Balai PKP (Almari arsip kaca 3 buah, Meja kursi tamu 1 buah, HT 2 buah, Stopwatch 6 buah, Koper besar 2 buah, Bantal guling 12 buah, Sprei dan sarung bantal 6 buah, Bed cover batik 6 buah, Taplak meja 24 buah, Serbet makan 12 buah); PC branded 5 unit, Notebook 5 unit, Printer 5 unit, Mesin fax 1 unit, Scanner 1 unit; Balai PKP (LCD Projector 1 unit dan kulkas 1 unit)	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 58% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 208.474.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.1.20.08.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Pemeliharaan gedung kantor 1 tahun; Pemeliharaan taman 1 tahun	Terpelihara rumah dan gedung kantor 100%	Dukungan 22% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 665.864.000,00	Rp. 600.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.090.301.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.06.1.20.08.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (roda empat dan roda dua) selama 1 tahun	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 17% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 159.195.000,00	Rp. 160.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.1.20.08.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Pemeliharaan mebeleur 1 tahun; Pemeliharaan perlengkapan kantor 1 tahun; Pemeliharaan peralatan kantor 1 tahun	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 2% terhadap sarana dan prasarana aparatur dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 24.612.400,00	Rp. 25.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.1.20.08.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 217.500.750,00	Rp. 193.000.000,00		
4.06.1.20.08.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	LKJ-IP Tahun 2017 1 laporan	Nilai LKJ-IP A	Dukungan 6% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 12.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.1.20.08.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Laporan keuangan bulanan 12 laporan; Laporan keuangan semesteran dan porgnosis 2 laporan ; Laporan keuangan tahunan 1 laporan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Dukungan 16% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 36.668.750,00	Rp. 35.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.090.301.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.06.1.20.08.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	DPA 2019 1 dokumen, DPPA 2018 1 dokumen	Dokumen perencanaan 2019 dan perubahan 2018	Dukungan 63% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 145.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
					Publikasi Website	Pembaharuan publikasi informasi BKD secara kontinyu 100%						
					Renja SKPD	1 dokumen						
					RKA	1 dokumen						
					RKT dan PK	2 dokumen						
					ROPK	1 dokumen						
4.06.1.20.08.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Laporan program dan kegiatan bulanan 12 laporan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 14% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 25.832.000,00	Rp. 26.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.1.20.08.00.15	PROGRAM PERENCANAAN, PENGADAAN PEGAWAI DAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN								Rp. 2.587.265.000,00	Rp. 3.400.000.000,00		
4.06.1.20.08.00.15.001	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Formasi dan proyeksi kebutuhan pegawai	2 dokumen	Dukungan 20% terhadap perencanaan, pengadaan pegawai dan pengelolaan data kepegawaian	100%	Rp. 1.600.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah												Jumlah Pagu : Rp. 16.090.301.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
4.06.1.20.08.00.15.002	Pengelolaan Sistem Informasi serta Dokumentasi Aparatur	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Arsip dokumen file perorangan	7500 arsip	Dukungan 10% terhadap perencanaan, pengadaan pegawai dan pegelolaan data kepegawaian	100%	Rp. 987.265.000,00	Rp. 900.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan		
					Arsip dokumen kolektif	400 SK kolektif								
					Penyediaan backup data pegawai	Data terintegrasi, valid dan update 100%								
4.06.1.20.08.00.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI								Rp. 5.622.266.210,00	Rp. 5.890.000.000,00				
4.06.1.20.08.00.16.001	Penegakan Disiplin Aparatur	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Mesin presensi	30 unit mesin presensi	Dukungan 2% terhadap peningkatan kualitas SDM dan pengembagn karir pegawai	100%	Rp. 632.272.300,00	Rp. 290.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan		
					Pemeliharaan mesin presensi	244 unit mesin presensi								
					Penurunan kasus pelanggaran hukum selama tahun 2018; Penetapan hukum pegawai; Laporan disiplin pegawai	1 Laporan (target 100%)								
4.06.1.20.08.00.16.002	Pengembangan Profesionalisme Aparatur	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi kediklatan	Terkirimnya PNS dalam diklat dan mengikuti diklat 100% (350 orang)	Dukungan 10% terhadap peningkatan kualitas SDM dan pengembangan karir pegawai	100%	Rp. 3.489.993.910,00	Rp. 5.000.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan		
					SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi pendidikan	Terpenuhinya standar pendidikan pegawai 100%								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah					Jumlah Pagu : Rp. 16.090.301.000,00							
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.06.1.20.08.00.16.003	Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Penempatan SDM sesuai formasi	100%	Dukungan 20% terhadap peningkatan kualitas SDM dan pengembangan karir pegawai	100%	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
					Pos jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi	100%						
4.06.1.20.08.00.17	PROGRAM PEMBINAAN KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI								Rp. 1.957.652.100,00	Rp. 1.900.000.000,00		
4.06.1.20.08.00.17.001	Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Fasilitasi JKK/JKN	20 orang	Dukungan 50% terhadap pembinaan kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai	100%	Rp. 1.492.652.100,00	Rp. 1.300.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
					Lomba MTQ	4 cabang lomba						
					Lomba olah raga ASN Pemda DIY	5 cabang lomba						
					Penghargaan Satyalancana Karya Satya	600 orang						
					Peningkatan kinerja organisasi dan aparatur (hasil penilaian TPP)	4 kali						
4.06.1.20.08.00.17.002	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Kenaikan pangkat akurat dan tepat waktu	900 PNS	Dukungan 50% terhadap pembinaan kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai	100%	Rp. 465.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
					Pembekalan PNS calon pensiun	700 PNS						
					Pemensiunan pegawai akurat dan tepat waktu	700 PNS						
					Rakor Kenaikan Pangkat Terpadu	2 Periode						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 16.090.301.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.06.1.20.08.00.18	PROGRAM PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH								Rp. 125.000.000,00	Rp. 130.000.000,00		
4.06.1.20.08.00.18.001	Pengelolaan Sertifikasi Layanan Mutu	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Layanan pelanggan meningkat melalui sertifikasi layanan mutu 1 laporan	Tercapainya peningkatan layanan aparatur 100%	Dukungan 100% terhadap peningkatan penatausahaan kepegawaian daerah	100%	Rp. 125.000.000,00	Rp. 130.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.1.20.08.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI								Rp. 2.246.937.500,00	Rp. 2.500.000.000,00		
4.06.1.20.08.00.19.001	Pengukuran Kompetensi Pegawai	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Profil kompetensi luar dan dalam DIY	760 orang	Dukungan 50% terhadap pengelolaan pengukuran kompetensi pegawai	100%	Rp. 1.800.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
					Profil potensi luat dan dalam DIY	860 orang						
4.06.1.20.08.00.19.002	Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Kesepalatan kerjasama pengukuran kompetensi 2 kesepakatan	Tercapainya kesepakatan kerjasama pengukuran kompetensi 100%	Dukungan 50% terhadap pengelolaan pengukuran kompetensi pegawai	100%	Rp. 446.937.500,00	Rp. 500.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
					Meningkatnya kompetensi sumber daya assessor melalui diklat dan pelatihan	Tercapainya peningkatan kapasitas assessor 100%						